



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Keragaan kinerja BPPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2021, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian menjadi empat kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - <80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja BPPSDMP

Capaian kinerja BPPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK BPPSDMP tahun 2022. Rincian hasil capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2022 ditampilkan pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5, capaian indikator kinerja BPPSDMP tahun 2022 menunjukkan bahwa semua target indikator kinerja tercapai dan semua kategori masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian yang paling tinggi adalah Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan capaian 113,60% sedangkan capaian terkecil terdapat pada indikator nilai kinerja anggaran dengan capaian 100,25%.



Tabel 6. Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	A Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	80	80,83	101,04	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	B Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	80	90,88	113,60	Sangat Berhasil
		C Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	80	84,46	105,57	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	D Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	20	20,25	101,23	Sangat Berhasil
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	E Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	33,75	34,95	103,55	Sangat Berhasil
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	F Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90,40	90,63	100,25	Sangat Berhasil

Sumber data Pusat dan Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022

1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP masing-masing Indikator Kinerja BPPSDMP tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Inovasi dan teknologi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Namun inovasi dan teknologi pertanian tidak akan bermanfaat jika petani tidak menggunakan atau menerapkannya dalam kegiatan usahatani karena petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertanian. Agar inovasi dan teknologi dapat diterapkan oleh petani dibutuhkan proses diseminasi inovasi dan teknologi oleh Penyuluh Pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian



berperan sangat penting karena sebagai jembatan teknologi dan inovasi hasil penelitian bagi petani, sehingga mereka mau dan mampu menerapkan inovasi dan teknologi untuk peningkatan produksi serta produktivitas usahataniannya.

Diseminasi inovasi teknologi pertanian merupakan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru untuk diterapkan dalam proses produksi atau kegiatan budidaya. Proses inovasi dan diseminasi teknologi pertanian sangat penting dalam mendorong proses penerapan inovasi serta teknologi oleh petani dalam pengelolaan usahataniannya.

Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakikatnya adalah proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahataniannya guna meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyuluh Pertanian merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses diseminasi inovasi dan teknologi kepada petani di WKPP, dengan materi inovasi teknologi yang bersumber dari hasil penelitian dan kajian Badan Litbang atau sumber informasi lainnya. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi dan produktivitas usahataniannya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) petani yang menerapkan teknologi sampai dengan tanggal **31 Desember 2022**, telah dicapai sebanyak **18.631.940 petani** yang menerapkan teknologi sepanjang tahun 2022, dari **23.050.830 petani** yang tergabung dalam kelompok tani secara nasional dan terdaftar dalam Aplikasi Simluhtan pada periode tanggal 31 Desember 2022.



Selanjutnya, untuk pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$= (\Sigma \text{ Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian}) / \Sigma \text{ total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian) } 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi, sebagai berikut:

$$= (18.631.940 / 23.050.830) \times 100\%$$
$$= 80,83 \%$$

Persentase capaian kinerja diperoleh dari:

$$= (80,83 / 80,00) \times 100$$
$$= 101,04 \% \text{ (sangat berhasil)}$$

Capaian realisasi tersebut, sangat dipengaruhi oleh kegiatan diseminasi teknologi kepada para petani melalui berbagai metode, antara lain: Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran APBN maupun PHLN (SIMURP dan IPDMIP), bimbingan teknis, latihan, kunjungan, dan supervisi oleh penyuluh pertanian, dll. Terkait hal tersebut, rincian capaian petani yang menerapkan teknologi sebanyak **18.631.940 petani (80,83%)**, diperoleh dari petani yang mengikuti kegiatan:

1. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran Dana Dekonsentrasi menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak **17.600 petani.**
2. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi *Climate Smart Agriculture* (CSA) yang bersumber dari anggaran PHLN (Proyek SIMURP) di 10 provinsi, 24 provinsi dan 117 BPP menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak **84.240 petani;**



3. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran PHLN (Proyek IPDMIP) yang dilaksanakan di 712 BPP, 65 kabupaten, dan 14 provinsi menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak **1.515.600 petani**.
4. Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi 37.810 Penyuluh Pertanian, menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi sebanyak **17.014.500 petani**. Fasilitasi BOP tersebut merupakan bantuan operasional bagi Penyuluh Pertanian dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada poktan dan petani binaannya, salah satunya melakukan diseminasi inovasi dan teknologi. Output dari kegiatan diseminasi teknologi pertanian adalah meningkatnya jumlah petani yang mau dan mampu menerapkan teknologi tersebut.

Pada umumnya, jenis inovasi teknologi yang diterapkan oleh petani, meliputi:

- 1) Aspek input
 - a. Pemupukan Berimbang
 - b. Penggunaan pupuk kompos dan pestisida nabati
 - c. Penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB)
- 2) Aspek budidaya
 - a. Penerapan jarak tanam
 - b. Penerapan sistem penanaman jajar legowo 2:1
 - c. Penerapan sistem penanaman jajar legowo super
 - d. Pengendalian hama terpadu
 - e. Budidaya tanaman dengan sistem pertanian terpadu
 - f. Mekanisasi pertanian (penggunaan alsinta seperti traktor roda dua, traktor roda empat, *combine harvester*, *rice transplanter*)
- 3) Aspek pengolahan dan *packaging*
 - a. Penggunaan *Rice Milling Unit*/RMU



b. Pengolahan pupuk kompos.

b. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Sumberdaya manusia pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya di lapangan sehingga berkorelasi dengan peningkatan produksi dan kesejahteraannya. Disamping itu juga diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian.

Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkatkan kapasitasnya dilakukan melalui data peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan. Cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Nilai rata-rata dari :

**(Nilai((Σ SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan) :
(Σ total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian) \times 100%)**

Cara pengambilan Data jumlah SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan:

1. Kunjungan lapang, wawancara, observasi dengan menggunakan instrument dan/atau
2. Menggunakan system aplikasi online.



Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dimaksudkan adalah realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan.

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan materi pelatihan, sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Tahun 2022

NO	SATKER	Σ SDM yang mengikuti pelatihan	ΣSDM yang menerapkan Materi pelatihan	%
1	PPMKP CIAWI	1592	1591	99,94
2	BBPKH CINAGARA	770	652	84,68
3	BBPP LEMBANG	549	510	92,90
4	BBPP KETINDAN	652	640	98,16
5	BBPP BATU	775	703	90,71
6	BBPP BATANGKALUKU	677	544	80,35
7	BBPP BINUANG	506	461	91,11
8	BBPP KUPANG	450	372	82,67
9	BPP JAMBI	419	368	87,83
10	BPP LAMPUNG	390	321	82,31
TOTAL		6.780	6.162	90,88

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh data jumlah SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan sebanyak 6.162 orang, sedangkan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pertanian sebanyak 6.780 orang. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2022 adalah :

$$= (6162 / 6780) \times 100\%$$

$$= 90,88\%$$



Presentase capaian kinerja dihitung dari:

$$= (90,88\% / 80) \times 100$$

$$= 113,60\% \text{ (sangat berhasil)}$$

Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan tahun 2022 adalah 80% dengan realisasi 90,88%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah 113,60% (**Sangat Berhasil**).

c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian

Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dihitung dari jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dan/atau berwirausaha dan/atau melanjutkan studi pendidikan di bidang pertanian. Lulusan pendidikan vokasi pertanian dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian dari institusi pendidikan di bawah BPPSDMP (Politeknik dan SMK-PP) pada tahun kelulusan yaitu Agustus T-1 dengan Agustus tahun berjalan.

Adapun hasil Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\sum \text{Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan}}{\sum \text{Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan}} \right) \times 100\%$$

$$= (1418 / 1.679) \times 100\%$$

$$= 84,46 \%$$

Persentase lulusan yang bekerja di bidang pertanian adalah:

$$= (84,46 / 80) \times 100\%$$

$$= 105,57\% \text{ (Sangat Berhasil)}$$

Realisasi persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2022 adalah 84,46% dari target 80%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian persentase lulusan Pendidikan vokasi



pertanian yang bekerja di bidang pertanian adalah 105,57% (Sangat berhasil). Rekapitulasi persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian di UPT ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 8. Rekapitulasi Jumlah Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian

No	Nama UPT	Jumlah Lulusan Yang Bekerja di bidang Pertanian
1	Polbangtan Medan	162
2	Polbangtan Bogor	211
3	Polbangtan YOMA Kampus Magelang	112
4	Polbangtan YOMA Kampus Yogyakarta	116
5	Polbangtan Malang	191
6	Polbangtan Gowa	248
7	Polbangtan Manokwari	76
8	PEPI	0
9	SMK-PP Sembawa	136
10.	SMK-PP Banjarbaru	103
11	SMK-PP Kupang	63
	Total	1418

Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian diukur dari beberapa data yaitu:

1. Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan (Agustus 2021 s.d Agustus 2022) sebagai pembilang
2. Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan sebagai penyebut
3. Hasil pembagian pembilang dan penyebut dalam bentuk persen.



Adapun data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian diambil dari sistem informasi penelusuran data alumni (Aplikasi *Treser Study*) dan Group WA alumni.

Formasi kerja lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain PNS dinas pertanian, wirausaha pertanian, perusahaan swasta dan BUMN yang bergerak di bidang pertanian (misalnya perkebunan sawit) dan melanjutkan pendidikan tinggi pertanian (universitas negeri/swasta dan politeknik pertanian). Selain bekerja di bidang pertanian, ada juga lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang non pertanian.

Kendala yang dihadapi dalam pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain jumlah lulusan Polbangtan dan SMKPP tersebar di berbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni. Selain itu partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal. (masukkan ke bab analisis factor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan)

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMKPP dengan cara menyebarkan link atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (Whatapps, Facebook dan media lainnya). Monitoring berkala dilakukan setiap akhir bulan melalui google split sheet dan pertemuan online secara rutin bersama seluruh Unit Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian.

d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan



kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian.

Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah Kelembagaan petani (Gapoktan) yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Secara umum, pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian dipedesaan.

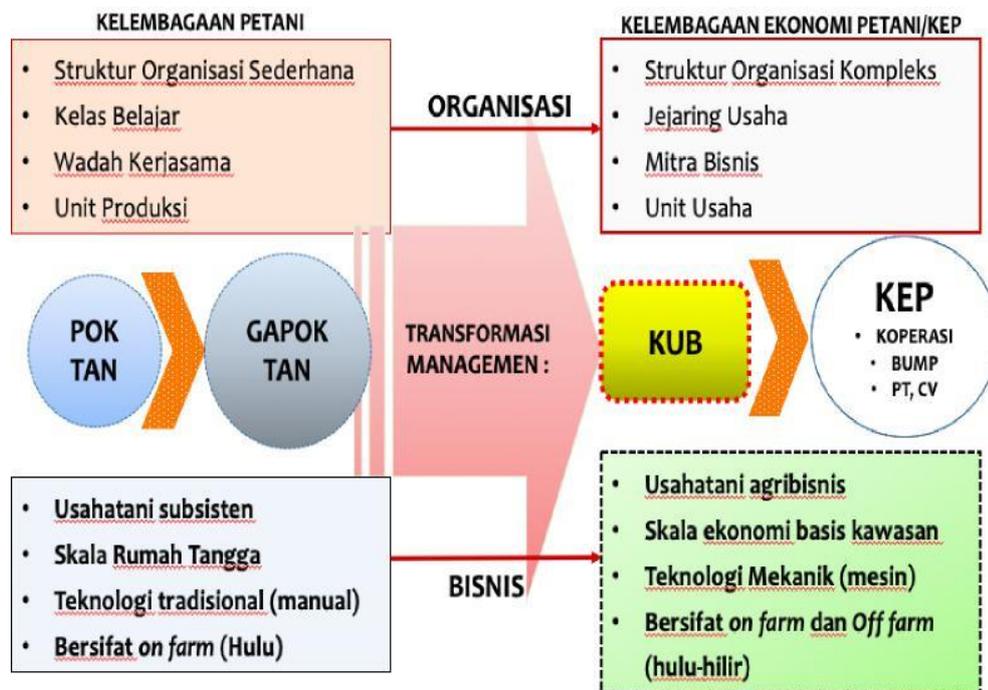
Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani, berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi yang dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani.

Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan



pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir.

Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada Gambar 4.



Gambar 4. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain :

- Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
- Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
- Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
- Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;



- f) Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
- g) Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan bentuk koperasi tani atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP) lainnya. Indikator capaian diukur dari persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, yaitu :

$$= \frac{(\Sigma \text{Kelembagaan Ekonomi Petani})}{(\Sigma \text{Total Kelembagaan Gapoktan})} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus capaian IKU tersebut, maka diperoleh hasil data capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2022, meliputi:

1. Data Gapoktan dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dalam aplikasi Simluhtan sampai dengan tanggal **31 Desember 2022**, yaitu
 - a. Gapoktan : **64.555 Gapoktan**
 - b. Kelembagaan Ekonomi Petani : **13.070 KEP**
2. Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, sebagai berikut :

$$= \frac{(13.070}{64.555)} \times 100\%$$

$$= 20.25\%$$

3. Persentase capaian kinerja adalah :

$$= \frac{(20.25}{20,00)} \times 100$$

$$= 101.23\% \text{ (sangat berhasil)}$$

Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah **20.25%** dari target 20%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase



capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah **101.23% (sangat berhasil)**.

Realisasi indikator kinerja Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya menjadi KEP yaitu sebanyak **13.070 KEP**. Bentuk- bentuk KEP yang ditumbuhkan dan dikembangkan yaitu: Koperasi Tani, Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKMA), dan Lainnya.

Tabel 9. Rekapitulasi data Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)
sampai dengan 31 Desember 2022

No	Provinsi	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani	Bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani						
			Koperasi Tani	PT	CV	KUB	LKMA	Lainnya	Tidak diketahui
1	Aceh	604	571	-	1	22	2	8	-
2	Bali	65	51	-	1	6	-	7	-
3	Banten	140	76	-	1	26	23	14	-
4	Bengkulu	108	48	1	-	5	39	15	-
5	D.I. Yogyakarta	448	94	-	-	233	87	34	-
6	DKI Jakarta	6	6	-	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	40	21	-	-	9	1	9	-
8	Jambi	313	107	1	1	139	43	22	-
9	Jawa Barat	1,387	328	3	6	517	219	314	-
10	Jawa Tengah	2,482	400	8	-	472	1,035	567	-
11	Jawa Timur	1,407	319	1	5	361	288	433	-
12	Kalimantan Barat	200	165	-	1	21	-	13	-
13	Kalimantan Selatan	305	29	-	2	135	24	115	-
14	Kalimantan Tengah	143	70	-	-	29	6	38	-
15	Kalimantan Timur	78	31	-	1	10	19	17	-
16	Kalimantan Utara	53	38	-	-	1	-	14	-
17	Kepulauan Bangka Belitung	31	25	1	-	2	-	3	-
18	Kepulauan Riau	19	15	-	-	2	-	2	-
19	Lampung	227	98	4	1	38	47	39	-
20	Maluku	28	17	-	-	8	1	2	-
21	Maluku Utara	17	-	1	-	1	-	15	-
22	Nusa Tenggara Barat	586	291	1	2	169	72	51	-
23	Nusa Tenggara Timur	427	133	-	2	252	16	24	-
24	Papua	38	3	-	-	32	-	3	-
25	Papua Barat	22	14	-	-	8	-	-	-



26	Riau	173	132	-	5	16	2	18	-
27	Sulawesi Barat	712	412	-	-	282	2	16	-
28	Sulawesi Selatan	763	242	-	1	327	67	126	-
29	Sulawesi Tengah	188	152	-	-	14	5	17	-
30	Sulawesi Tenggara	465	109	-	1	271	48	36	-
31	Sulawesi Utara	63	28	-	3	21	-	11	-
32	Sumatera Barat	309	107	-	-	114	61	27	-
33	Sumatera Selatan	682	166	-	-	153	76	287	-
34	Sumatera Utara	541	246	-	1	256	24	14	-
J u m l a h		13,070	4,544	21	35	3,952	2,207	2,311	-

Sumber data: Aplikasi Simluhtan periode 31 Desember 2022

e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP aspek Pemenuhan dan Reform melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB berdasarkan hasil kesepakatan Tim Asesor Reviu dengan Itjen Kementan. Sumber data dari nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu di Bagian Umum Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup PPSDMP. Data diperoleh dengan melihat hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP untuk level Eselon I merupakan nilai komponen 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada aspek Pemenuhan dan Reformasi yaitu (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan Pengawasan; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan evaluasi mandiri atas implementasi 8 (delapan) area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018.



Hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan penjumlahan penilaian capaian subkomponen perubahan dan capaian subkomponen reformasi. Secara rinci penilaian untuk masing masing subkomponen diuraikan sebagai berikut.

Rincian hasil capaian subkomponen perubahan dari penilaian komponen pengungkit pada Tabel 9.

Tabel 10. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Subkomponen Perubahan BPPSDMP tahun 2022

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	100
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,95	97,5
4	Penataan Tatalaksana	1,00	1,00	100
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40	100
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	100
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,20	100
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,40	96
	Jumlah	14,60	14,45	98,97

Sumber data : Sekretariat BPPSDMP tahun 2022

Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada subkomponen perubahan BPPSDMP tahun 2022 adalah **14,45**. Berdasarkan Tabel 9, BPPSDMP mencapai nilai tertinggi untuk komponen pengungkit penguatan akuntabilitas, dan nilai terendah untuk komponen pengungkit deregulasi kebijakan dan penataan tatalaksana.

Selanjutnya, hasil penilaian mandiri pada subkomponen reform ditampilkan pada Tabel 10.



Tabel 11. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pada Subkomponen Reform BPPSDMP tahun 2022

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,42	81
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	100
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,50	75
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,63	97
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	100
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	100
Jumlah		21,70	20,50	94,47

Sumber data : Sekretariat BPPSDMP tahun 2022

Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada subkomponen reform BPPSDMP tahun 2022 adalah **20,50**.

Berdasarkan hasil pengukuran dua subkomponen di atas, diperoleh hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Jenderal sebesar **34,95**. Nilai tersebut merupakan penjumlahan penilaian capaian subkomponen perubahan dan capaian subkomponen reformasi, yaitu:

$$= 14,45 + 20,50 = 34,95$$

Target nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP adalah nilai **33,50**. Sehingga capaian kinerja nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu :

$$= (34,95/33,75) \times 100$$

$$= 103,55\% \text{ (Sangat Berhasil)}$$



f. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi yang dilaksanakan oleh BPPSDMP diperoleh dari variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Sumber data dan pihak yang melakukan pengukuran NKA BPPSDMP adalah Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup BPPSDMP.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Pasal 39 sebagai berikut:

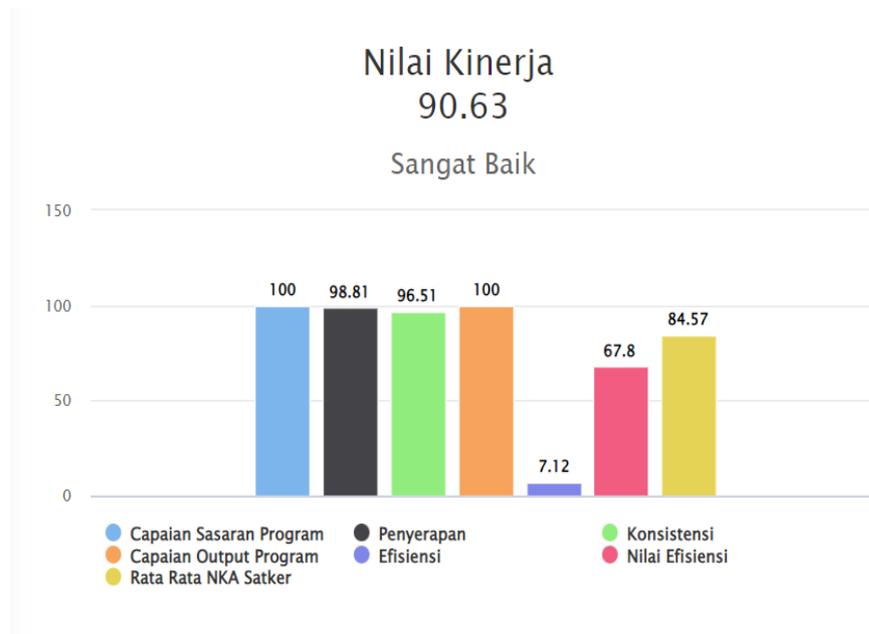
- 1) $90\% > NK \leq 100\%$ kategori Sangat Baik
- 2) $80\% > NK \leq 90\%$ kategori Baik
- 3) $60\% > NK \leq 80\%$ kategori Cukup atau Normal
- 4) $50\% > NK \leq 60\%$ kategori Kurang
- 5) $NK \leq 50\%$ kategori Sangat Kurang

Realisasi NKA BPPSDMP tahun 2022 adalah **90,63** termasuk kategori nilai kinerja (NK) **Baik**. Berdasarkan aplikasi SMART Tahun 2022 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2022, total penyerapan anggaran (PA) mencapai 98,81%, rata-rata konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (RPD) sebesar 96,51%, efisiensi sebesar 7,12 dengan Nilai Efisiensi sebesar 67,80%, capaian output program sebesar 100%, capaian sasaran program sebesar 100%, dan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker sebesar 84,57%. Berdasarkan pencapaian tersebut menghasilkan **Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPSDMP Tahun**



2022 sebesar 90,63%, termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Dengan demikian, target NKA tahun 2022 sebesar 90,40% sudah tercapai, dan persentase capaian kinerja sebesar **100,25%** kategori **SANGAT BERHASIL**.

Pencapaian NKA BPPSDMP tahun 2022 ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2022

Target NKA BPPSDMP tahun 2022 adalah **nilai 90,40** sehingga capaian kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2022 yaitu:

$$\begin{aligned} &= (90,63/90,40) \times 100 \\ &= \mathbf{100,25\% \text{ (Sangat Berhasil)}} \end{aligned}$$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja BPPSDMP 3 (tiga) tahun 2020–2022

Untuk mengetahui kecenderungan Realisasi Kinerja BPPSDMP mulai dari tahun 2020 – 2022 ditampilkan pada Tabel 11.



Tabel 12. Realisasi Kinerja BPPSDMP Tahun 2020 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	70,00	70,19	75,00	75,51	80,00	80,83
2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	60,00	99,50	75,00	79,92	80,00	90,88
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	65,00	76,62	75,00	85,94	80,00	84,46
4	Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya (%)	18,00	18,00	19,00	19,83	20,00	20,25
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	33,25	34,56	33,50	34,57	33,75	34,95
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	90,00	75,85	91,00	89,87	90,40	90,63

Sumber Data: BPPSDMP tahun 2022

Tabel 11 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2020 – 2022) target 6 indikator kinerja BPPSDMP meningkat setiap tahunnya, namun tidak demikian dengan realisasinya. Tahun 2020 dan 2021, dari 6 indikator kinerja, hanya indikator Nilai Kinerja Anggaran yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 sebesar 75,85 jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 90,00; sedangkan capaian tahun 2021 sebesar 89,87 lebih rendah dari target 91,00 meskipun sudah masuk dalam kategori berhasil. Namun



demikian, di tahun 20222 capaian Nilai Kinerja Anggaran telah mencapai target yang ditetapkan.

Selain itu terdapat penurunan realisasi pada indicator persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya di tahun 2021 namun meningkat Kembali pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan adanya perubahan dalam perhitungan pengukuran indicator kinerja utama, yang awalnya dihitung dari peserta yang lulus mengikuti pelatihan dan peserta yang lulus uji sertifikasi profesi yang diubah menjadi peserta pelatihan yang telah menerapkan materi pelatihan.

3. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024)

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024) pada Tabel 12.

Agar lebih mudah membandingkan realisasi capaian kinerja BPPSDMP tahun 2020-2022 dengan target 2023-2024, dilakukan proyeksi berdasarkan kecenderungan (trend) realisasi indicator kinerja. Perbandingan tersebut diprediksi bahwa target jangka menengah indicator kinerja akan dapat tercapai sampai dengan tahun 2024, kecuali untuk indicator kinerja anggaran. Jika mengikuti trend realisasi nilai kinerja anggaran, diprediksi target jangka menengah kemungkinan tidak tercapai. Namun, BPPSDMPP telah melakukan upaya upaya agar nilai kinerja anggaran dapat mencapai target. Hal ini terbukti dengan realisasi nilai kinerja anggaran yang mencapai target di tahun 2023.



Tabel 13. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP tahun 2020 - 2022 dengan target jangka menengah dalam Renstra

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET JANGKA MENENGAH	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	70,19	75,51	80,83	85,00	90,00
2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	99,50	79,92	90,88	85,00	90,00
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	76,62	85,94	84,46	85,00	90,00
4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	18,00	19,83	20,25	21,00	22,00
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP	34,56	34,57	34,95	34,00	34,25
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	75,85	89,87	90,63	90,60	90,80

Sumber Data: BPPSDMP tahun 2022

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi

a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Persentase capaian dari indikator kinerja petani yang menerapkan teknologi tahun 2022 adalah **101.04%**, dari target sebesar 80% dan realisasi sebesar **80,83%**.

Penerapan teknologi pertanian sangat penting dalam meningkatkan produktivitas usahatani yang berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penerapan teknologi sangat dipengaruhi oleh diseminasi teknologi karena pada hakikatnya merupakan proses



penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahatani. Diseminasi sebagai proses penyebaran teknologi (hasil penelitian dan pengkajian) yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru sangat berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusahatani. Penerapan teknologi pertanian berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tepatnya peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator dan inovator dalam melakukan diseminasi/penyebaran teknologi pertanian kepada petani.

Penyuluh pertanian sebagai inovator berperan dalam penyebarluasan inovasi dan teknologi kepada petani melalui berbagai media dan metode penyuluhan pertanian sehingga outputnya adanya perubahan perilaku, sikap dan keterampilan petani dalam menerima serta menerapkan teknologi pertanian. Dengan penyebarluasan teknologi pertanian yang masif dan intensif oleh penyuluh pertanian kepada petani melalui berbagai kegiatan penyuluhan pertanian maka diinformasikan bahwa pada tahun 2022 sebanyak **18.631.940 petani** dapat menerapkan teknologi pertanian pada usahatani.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya realisasi persentase petani yang menerapkan teknologi sebesar 80,83%, antara lain adanya upaya dan dukungan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian dalam penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di pusat dan daerah melalui:

- 1) Kegiatan Sekolah Lapang (SL) sebagai wadah/tempat pembelajaran dan diseminasi teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh poktan dengan sumber anggaran dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi serta Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui proyek SIMURP dan IPDMIP
- 2) Dukungan fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) selama 12 bulan bagi Penyuluh Pertanian untuk mengoptimalkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan peran serta tugasnya sebagai:



- a) Inovator dan edukator dalam penyebarluasan/diseminasi teknologi pertanian kepada poktan dan petani binaannya
 - b) Fasilitator dalam memfasilitasi petani mengidentifikasi permasalahan usahataniya serta dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan program Kementerian Pertanian di wilayahnya
- 3) Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan petani secara daring dan luring
- 4) Diseminasi/penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian secara online/daring melalui:
- a) Acara “Ngobrol Asyik” (Ngobras) yang dilaksanakan setiap hari Selasa yang sudah terselenggara sebanyak 40 episode
 - b) Acara “Ngobrol Asyik” (Ngobras) on The Spot (OTS) yang sudah terselenggara sebanyak 12 episode.
 - c) Podcast (NGepod) The Spot (OTS) yang sudah terselenggara sebanyak 48 volume.
 - d) Acara “ke Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian” (MSPP) yang sudah terselenggara sebanyak 48 episode



- 5) Penguatan media dan materi penyuluhan pertanian yang disajikan melalui:
- a) Website Cyber Extension yang merupakan mimbar penyuluhan pertanian untuk pelayanan data serta penyampaian materi dan informasi pertanian khususnya



- b) dalam membantu memperlancar dan mempermudah fasilitasi materi kepada penyuluh pertanian dan petani. Materi penyuluhan yang tersedia sebanyak 200 materi
- c) Jurnal Suluh tani : 1 volume
- d) Media cetak : Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya dengan alokasi pembiayaan dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi



Tabloid Sinar Tani = 46.208 Eksemplar



Majalah Swadaya = 7.188 Eksemplar



Majalah Pilar = 7.188 Eksemplar

- 6) Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 7) Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi melalui anggaran Proyek IPDMIP



Namun dalam upaya pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian" terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Adanya Kebijakan Pemblokiran Anggaran/*Automatic Adjustment* (AA) untuk kegiatan Sekolah Lapang (SL) dan Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sehingga 2 (dua) kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal;
- 2) Semakin berkurangnya jumlah penyuluh pertanian di 34 provinsi karena pensiun dan meninggal;
- 3) Kurang tersedianya dukungan alat bantu penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya
- 4) Terdapat karakteristik kelompok petani yang dikategorikan sebagai penganut lambat (*late majority*) dan kelompok yang "kolot" (laggard) dalam mengadopsi teknologi
- 5) Terdapat karakteristik teknologi yang sulit dikomunikasikan, sulit diamati, dan sulit diterapkan karena faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan alam.

b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya

Persentase capaian dari indikator kinerja sdm pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2022 adalah **113.60%**, dari target sebesar 80% dan realisasi sebesar **90,88%**.

Keberhasilan tercapainya persentase peningkatan SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya didukung oleh:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan;

Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik harus dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar Kompetensi Kerja (SKK)



dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).

2. Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat

Metodologi pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta pelatihan yang akan dilatih. Metodologi pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), *Experiential Learning Cycle* (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktek, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, sasaran, mata pelatihan; dan silabus. Selain penyusunan kurikulum juga disusun silabus pelatihan. Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi pelatihan; dan perkiraan waktu pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

3. Profesionalisme ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara)

Penetapan ketenagaan pelatihan didasarkan pada kesesuaian kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamakan bagi yang memiliki sertifikat pelatihan bagi pelatih di bidangnya.



Konvensi Nasional Kaji Ulang SKKNI Bidang Penyembelihan Hewan Halal



Sertifikasi Inseminator Buatan (IB)

4. Prasarana dan sarana pelatihan yang mendukung;

Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang pelatihan.



5. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan

Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka *sharing experience*

Selain upaya, dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ditemukan beberapa kendala dan upaya penanggulangannya sebagai berikut:

1. Adanya *refocusing* anggaran dan anggaran biaya tambahan, mengakibatkan target penyuluh dan petani yang akan ditingkatkan pengetahuannya melalui pelatihan berkurang jumlah.

Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk tetap meningkatkan pengetahuan bagi penyuluh dan petani telah dilaksanakan program pelatihan *online* berbasis *Learning Management System* (LMS) dan *Zoom Meeting* dengan nama *Bertani On Cloud* (BOC). Dengan BOC maka peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pertanian tetap dapat dilaksanakan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu.



- 2) Purnawidya pelatihan memerlukan sarana untuk menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan, sedangkan penyelenggara pelatihan memerlukan waktu untuk merekap dan menyajikan data.

Upaya penanggulangan yang dilakukan agar purnawidya peserta pelatihan dapat menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan, dan penyelenggara Pelatihan dapat dengan cepat menyajikan laporan dari hasil yang disampaikan oleh purnawidya, pusat pelatihan pertanian telah menyiapkan aplikasi dengan nama e-pik (elektronik pengukuran indicator kinerja) dokumentasi purnawidya yang telah menerapkan materi pelatihan di tempatnya.

c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian

Persentase capaian dari indikator lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian tahun 2022 adalah **105.57%**, dari target sebesar 80% dan realisasi sebesar **84,46%**.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian dan SMK Pembangunan Pertanian - Vokasi Pertanian dengan tujuan untuk mencetak wirausahawan muda pertanian dan pelaku pertanian.
2. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Polbangtan dan SMK PP menggunakan kurikulum dengan bobot 70% praktek, 30% teori serta model pembelajaran *teaching factory* yang mampu memberikan materi sesuai dengan program studi dan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI).



Mahasiswa Polbangtan sedang mengikuti kegiatan *teaching factory*

3. Pelaksanaan seminar/kuliah umum dengan mengundang narasumber berpengalaman yang mampu memotivasi dan menginspirasi siswa dan mahasiswa sehingga tumbuh semangat dan kecintaan terhadap dunia pertanian.
4. Dukungan program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang sangat efektif menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswa dan mahasiswa dalam membangun mental dan semangat berwirausaha selama menjadi peserta didik di bidang pertanian. Siswa dan mahasiswa yang mengikuti program PWMP ketika lulus akan memiliki pola pikir kewirausahaan dan jenis usaha di bidang pertanian.
5. Dukungan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian dalam beberapa hal, diantaranya para praktisi/pakar pertanian terlibat dalam penyusunan kurikulum, menjadi dosen/pengajar pada setiap program studi sesuai dengan kompetensi, program magang bagi dosen dan mahasiswa atau siswa di industri.



6. Dukungan program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan profesional dan balai pelatihan pertanian serta industri yang dapat memberikan pemahaman dan kompetensi sesuai dengan dunia kerja. Setelah mengikuti program pelatihan/*retooling*, dilakukan seleksi oleh dunia usaha dan dunia industri terhadap siswa/mahasiswa untuk bisa direkrut sebagai karyawan/pegawai di bidang pertanian.
7. Dukungan dari proses seleksi minat dan bakat di bidang pertanian yang dilakukan pada saat masuk Polbangtan dan SMK PP, sehingga mahasiswa dan siswa sudah sejak awal perkuliahan memiliki jiwa cinta pertanian.

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Kalian generasi milenial..
AYO..!

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
TAHUN 2022

KULIAH DI
POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN (POLBANGTAN)
DAN
POLITEKNIK ENJINIRING
PERTANIAN INDONESIA (PEPI)

Polbangtan Bogor, Polbangtan Medan, Polbangtan Manokwari
Polbangtan Yogyakarta-Magelang, Polbangtan Malang
Polbangtan Gowa, PEPI

CARA PENDAFTARAN

Kalian bisa langsung mengakses INFORMASI PMB Polbangtan/PEPI secara online di
<https://pmb.pusdiktan.id>

JALUR DAN JADWAL PENDAFTARAN

JALUR UNDANGAN
21 Februari - 5 Maret 2022
Lulusan SMK-PP atau SMK Pertanian, Anak dari Petani Berprestasi, anak dari petani dikawasan strategis Kementan dan yang berada diwilayah 3T.

JALUR TUGAS BELAJAR
21 Februari - 5 Maret 2022
Pegawai Negeri sipil pertanian pusat atau daerah.

JALUR UMUM
1 - 31 Maret 2022
Lulusan SMK Pertanian atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan.

JALUR KERJASAMA
1 - 31 Maret 2022
Kerjasama antara Pemda/swasta dengan Polbangtan/PEPI.

JALUR POSIM
25 - 30 Juni 2022
Lulusan SMK Pertanian atau yang sederajat. Memiliki prestasi akademik, olahraga, seni, keilmuan dan minat wirausaha.

Profesional Daya Saling Wirausaha
<http://bppsdp.pertanian.go.id>

Design by: anangp44@2022



Factor yang menjadi kendala pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain: 1) jumlah lulusan Polbangtan dan SMKPP tersebar di berbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni, 2) Partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMKPP dengan cara menyebarkan link atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (Whatapps, Facebook dan media lainnya). Selain itu dilakukan monitoring setiap akhir bulan oleh Pusat Pendidikan Pertanian.

d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Untuk mewujudkan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP dilakukan dengan pengawalan dan pendampingan serta bersinergi dengan pihak terkait lainnya guna mendukung terwujudnya kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP.

Capaian dari indikator kinerja persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2022 adalah **20,25% dari target 20%**, sehingga capaian kinerja sebesar **101.23**.

Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian telah mengupayakan berbagai kegiatan, antara lain:

- 1) Mendorong Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan secara rutin kepada kelembagaan petani di wilayah kerjanya untuk peningkatan kapasitasnya agar dapat ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi: Melakukan identifikasi poktan, gapoktan dan Kelompok



Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:

- Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar;
 - Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
 - Memiliki rencana usaha;
 - Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
 - Telah membangun kemitraan usaha.
- 2) Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
 - 3) Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
 - Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
 - Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
 - Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
 - Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
 - Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
 - 4) Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) melalui anggaran Proyek SIMURP di 117 BPP dan Proyek IPDMIP
 - 5) Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cyber extension dan media cetak (Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2022;
 - 6) Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang



dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu.

- 7) Peningkatan sinergitas dengan unit kerja lingkup Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dan Kementerian dan lembaga Lain dan Pemerintah daerah dalam penumbuhkembangan korporasi.

Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP, yaitu:

- a. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari APBN;
- b. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
- c. Keterbatasan kelembagaan petani dan KEP dari aspek permodalan;
- d. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan dan pemasaran;
- e. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
- f. Kelembagaan Ekonomi Petani belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena belum mampu mengakses sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar;
- g. Kompetensi petani sebagai pengelola KEP dan infrastruktur teknologi yang rendah serta kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi serta pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara professional
- h. Belum sinerginya antar instansi dan K/L lainnya dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP/Korporasi.



e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP

Persentase capaian dari indikator Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP tahun 2022 adalah **103.55%**, dari target sebesar 33,75 dan realisasi sebesar **34,95%**.

Capaian nilai PMPRB BPPSDMP Tahun 2022 diperoleh melalui Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 pada 8 area perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 20 April 2022 melalui kesepakatan antara Assesor BPPSDMP dan Assesor Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian telah membentuk:

- a. Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 113/Kpts/OT.240/I/03/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2022 dan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 116/Kpts/OT.240/I/03/2022 tentang Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2022
- b. Road Map Reformasi Birokrasi BPPSDMP Tahun 2020 -2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 10/Kpts/OT.240/I/01/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BPPSDMP Tahun 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan ketetapan Kepala Badan Nomor 31/Kpts/OT.240/I/01/2022 tentang Rencana Kerja RB BPPSDMP Tahun 2022;



- c. Pembentukan Tim Agen Perubahan dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 28/Kpts/OT.240/I/01/2022 tentang Agen Perubahan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Perubahan yang dilakukan oleh Tim Agen Perubahan BPPSDMP melalui aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain:
 - 1) Aplikasi Si Juru Tani dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
 - 2) D Corp Model dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;
 - 3) Formula Ovis Tanaman Cabe dari Balai Besar Pelatihan pertanian Ketindan;
 - 4) Wednesday Free Training (WENNING) dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara; dan
 - 5) Aplikasi DIGITA dari Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi
2. Penataan Peraturan perundang-undangan
 - a. BPPSDMP bersama dengan Tim Panitia Antar Kementerian melakukan pembahasan dan penyusunan Peraturan Presiden tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian dan Pembentukan Badan Otorita sebagai salah satu perwujudan untuk meningkatkan produktifitas pangan Indonesia sesuai dengan program presiden;
 - b. Untuk mengharmonisasikan perbedaan antara norma pengaturan mengenai kelembagaan penyuluhan pertanian dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga ditetapkan Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2020 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan.



3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dengan menyusun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan diturunkan kembali dengan menyusun Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

4. Penataan Ketatalaksanaan

- a. Reviu dan evaluasi SOP terkait Peta Proses Bisnis terkait dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Perpres Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dan dibentuknya Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian.
- b. Pengembangan e-Government yang dimiliki BPPSDMP sehingga mempermudah pengguna layanan dalam mengakses kebutuhan pengguna layanan.
- c. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi public.
- d. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang andal.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Meningkatkan kemampuan ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif melalui pelatihan yang dilakukan secara webinar maupun secara *offline* pada Balai Pelatihan Pertanian BPPSDMP;
- b. Pembinaan dan Bimtek Program Ketrampilan Dasar Teknis Instruksional (Pekerti)/Applied Approach (AA) bagi Dosen.

6. Penguatan Akuntabilitas

- a. Revisi Renstra BPPSDMP;



- b. Penyusunan Indikator Kinerja;
 - c. Pemutahiran Rencana Aksi;
 - d. Updating data Perjanjian Kinerja;
 - e. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat dan Laporan Kinerja BPPSDMP;
 - f. Pelaksanaan Rapat Pimpinan.
7. Penguatan Pengawasan

Menindaklanjuti Permen PAN dan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi ZI menuju WBK WBBM di Instansi Pemerintah dan hasil rapat evaluasi pelaksanaan zona integritas WBK/WBBM Tahun 2020, serta Sosialisasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2021. BPPSDMP melalui surat Sekretaris Badan Nomor B-8335/KP.100/I.1/06/2021, tanggal 10 Juni 2021 mengusulkan 7 Unit Pelaksana Teknis Calon WBK-WBBM sebagai berikut:

NO	NAMA UNIT KERJA	USULAN
1	BBPP Batangkaluku	WBBM
2	PPMKP Ciawi	WBK
3	Polbangtan Yogyakarta-Magelang	WBK
4	Polbangtan Malang	WBK
5	BBPP Binuang	WBK
6	BBPP Batu	WBK
7	BPP Lampung	WBK

Berdasarkan seleksi dan penilaian dari Tim Penilai Internal (Inspektorat Jenderal) yang berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal, melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tanggal 29 Juli 2021, UPT BPPSDMP yang masuk Calon WBK-WBBM Nasional adalah:



NO	NAMA UNIT KERJA	NILAI	USULAN
1	Polbangtan Yogyakarta-Magelang	91,55	WBK
2	PPMKP Ciawi	83,46	WBK
3	Polbangtan Medan	82,36	WBK
4	BBPP Ketindan	81,43	WBK

Keempat UPT di atas telah menerapkan ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Mengikuti kompetisi Inovasi pelayanan publik sebanyak 2 unit kerja pelayanan publik lingkup BPPSDMP yang mewakili Kementerian Pertanian:
 - 1) Aplikasi Si Juru Tani (Polbangtan Yoma) yang mewakili BPPSDMP menjadi Inovasi Top 99 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 2) Aplikasi D'Corp Model (BBPP Binuang)
- b. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unit kerja BPPSDMP;
- c. Melakukan evaluasi standar pelayanan publik terhadap unit kerja pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peran agen perubahan Badan PPSDMP yang diharapkan mampu mengklarifikasi perubahan dan membuatnya lebih mudah dilakukan. Sebagai fasilitator, agen perubahan harus merancang sistem, alat, formulir, dan proses yang memungkinkan orang berhasil ketika mereka mengalami perubahan;



2. Mendorong setiap Unit Pelaksana Teknis untuk mengembangkan inovasi yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing;
3. Menyusun SOP kompensasi jenis pelayanan pelatihan dan pendidikan lingkup BPPSDMP serta jenis kompensasinya; menambah jumlah survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelatihan dan pendidikan minimal 4 kali selama setahun;
4. Meningkatkan aktivitas dalam membuat perubahan/inovasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan pelatihan dan Pendidikan;
5. Melakukan pembinaan kepada pegawai untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan *punishment* disesuaikan dengan PP No. 94 Tahun 2021;
6. Melakukan upaya peningkatan nilai capaian sasaran kinerja dari Nilai Kinerja.

f. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP

Persentase capaian dari indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2022 adalah **100.25%**, dari target sebesar 9040% dan realisasi sebesar **100,25%**.

Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data terkait pencapaian nilai kinerja:

- 1) Sering bergantinya admin/petugas entri data pada aplikasi SMART terutama pada satker Dekonsentrasi dan kadang tidak ada *transfer knowledge* dari petugas yang lama;
- 2) Kurangnya SDM di daerah sehingga Admin/petugas monev ada yang merangkap sebagai Penyuluh, PPK, menangani bidang keuangan, menangani bidang program/ perencanaan, bahkan



sekaligus sebagai admin satker lainnya selain satker 10 (BPPSDMP), seperti Tanaman Pangan, Hortikultura, PKH, Perkebunan dan PSP;

- 3) Data capaian output integrasi dari SAS/SAKTI kadang bersifat anomali sehingga masih diperlukan koreksi terhadap data tersebut;
- 4) Nilai konsistensi tidak mencapai nilai maksimal 100% karena masih terdapat 18 satker di daerah yang nilai konsistensinya kurang dari 90%, hal ini disebabkan belum mengacunya pelaksanaan kegiatan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) dan terlambat melakukan revisi RPD pada halaman lembar III DIPA;
- 5) Masih rendahnya efisiensi dipengaruhi oleh ketercapaian Rincian Output (RO) dan realisasi anggaran masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO).

Dari permasalahan di atas, dalam rangka perbaikan nilai kinerja pada tahun yang akan datang maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Badan PPSDMP secara rutin menyelenggarakan Bimtek SMART per semester setiap tahunnya (tahun 2022 hanya terselenggara 1 kali karena pemotongan anggaran, sehingga semester II hanya dilaksanakan secara *online*), namun masih diperlukan pemantauan dan pembinaan secara intensif juga dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Pusat sebagai penanggung jawab di satker Dekon dan UPT Pusat;
- 2) Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
- 3) Perlu dilakukan koreksi data pada aplikasi SMART pada menu yang telah tersedia setelah integrasi data masuk ke dalam SMART setiap bulannya;



- 4) Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD (Rencana Penarikan Dana), agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 5) Memaksimalkan capaian RO diikuti dengan adanya efisiensi biaya;
- 6) Nilai Kinerja satker didorong untuk lebih ditingkatkan lagi terutama pada aspek CRO dan konsistensi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan aplikasi SMART yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2022, pencapaian pelaksanaan anggaran Kinerja lingkup BPPSDMP tahun 2022 yaitu 90,63% dari target nilai 90.40.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran > 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
- b. Nilai Kinerja Anggaran > 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;
- c. Nilai Kinerja Anggaran > 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;
- d. Nilai Kinerja Anggaran > 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;
- e. Nilai Kinerja Anggaran \leq 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDMP tahun 2022 berdasarkan aplikasi SMART termasuk dalam kategori nilai kinerja **Sangat baik (NK Anggaran >90%)**. Realisasi kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2022 adalah Nilai 90,63 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Capaian Ouput Program = 100
- b. Penyerapan = 98,81



- c. Konsistensi = 96,51
- d. Efisiensi = 7,12
- e. Capaian Sasaran Program = 100
- f. Rata-rata NKA Satker = 84,57
- g. Nilai Efisiensi = 67,8

Analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK Nomor 214/2017 dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan berikut :

Rumus :

$$NE = 50\% + [E/(20 \times 50)]$$

Keterangan : NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%. Persentase capaian kinerja BPPSDMP tahun 2022 dalam hal efisiensi adalah mencapai -20%, maka penghitungan nilai efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + [7,12\% / (20 \times 50)] \\ &= 0,5 + [0,0712 / (20 \times 50)] \\ &= 0,5 + 0,178 \\ &= 0,678 \text{ atau } 67,8\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran BPPSDMP pada tahun 2022 adalah 67,8% (**Cukup**).

C. Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2022

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2022 adalah Rp **1.255.884.425.497,-** dari pagu sebesar Rp **1.270.982.321.000,-**. Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2022 adalah **98,81%**.

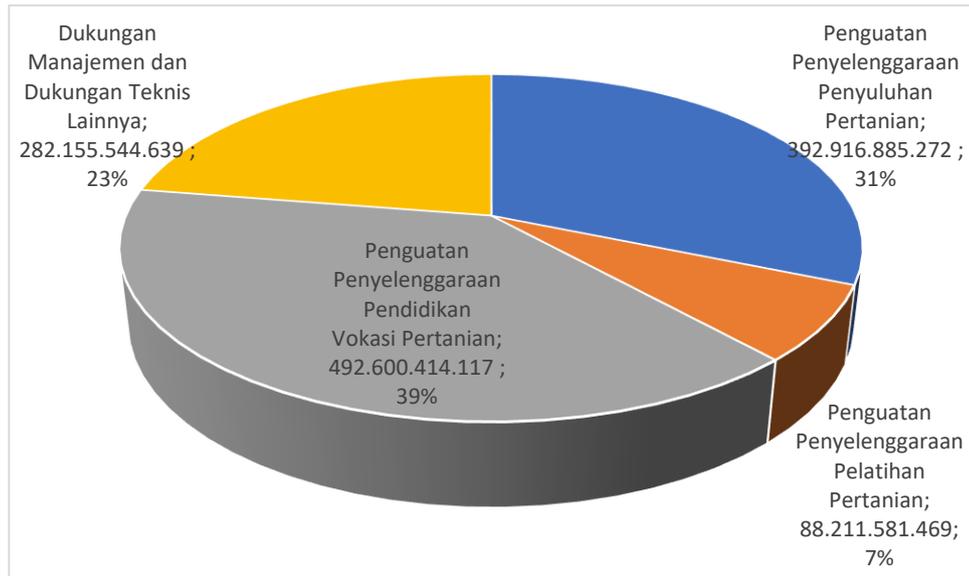


Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2022 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 392.916.885.272,-; Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 88.211.581.469,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 492.600.414.117,-; dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 282.155.544.639,-. Pagu dan realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2022 ditampilkan di Tabel 13 dan Gambar 12.

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan	397.878.040.000	392.916.885.272	98,75
2	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	90.526.056.000	88.211.581.469	97,44
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	499.149.842.000	492.600.414.117	98,69
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis	283.428.383.000	282.155.544.639	99,55
	TOTAL	1.270.982.321.000	1.255.884.425.497	98,81

Sumber data: Sekretariat BPPSDMP tahun 2022



Gambar 6. Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup BPPSDMP tahun 2022

Realisasi anggaran per output kegiatan tahun 2022 yang tertinggi adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP yaitu 99,55%, sedangkan terendah adalah pada Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu 97,44%. Rincian realisasi anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 15. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2022

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Penyuluhan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	123.581.147.000	121.613.538.998	98,41
2	Dekonsentrasi (DK)	274.296.893.000	271.303.346.274	98,91
Total		397.878.040.000	392.916.885.272	98,75

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022



Tabel 14 menunjukkan bahwa realisasi anggaran kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2022 terbagi atas dua kewenangan yaitu kewenangan kantor pusat dalam hal ini Pusat Penyuluhan Pertanian dan Dekonsentrasi. Tahun 2022 realisasi anggaran kewenangan dekonstrasi lebih tinggi dari yaitu 98,91 daripada realisasi Pusat Penyuluhan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 98,41%.

2) Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 15.

Tabel 16. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2022

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Pelatihan Pertanian/ Kantor Pusat (KP)	53.112.491.000	51.068.268.090	96,15%
2	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	37.413.565.000	37.143.313.379	99,28%
Total		90.526.056.000	88.211.581.469	97,44%

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022

Berdasarkan Tabel 15 terlihat bahwa UPT Pelatihan (Kantor Daerah) mencapai realisasi lebih tinggi yaitu sebesar 99,28% dari kantor pusat (Pusat Pelatihan Pertanian) sebesar 96,15%.

3) Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 16.



Tabel 17. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Tahun 2022

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	58.635.871.000	57.635.944.478	98,29
2	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	440.513.971.000	434.964.469.639	98,74
	TOTAL	499.149.842.000	492.600.414.117	98,69

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022

Persentase realisasi anggaran per *output* kegiatan Pendidikan Pertanian tahun 2022 di UPT Pendidikan/Kantor Daerah (KD) yaitu 98,74% lebih tinggi daripada realisasi anggaran di Pusat Pendidikan Pertanian /Kantor Pusat (KP) yaitu 98,29%.

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP

Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya secara rinci ditampilkan pada Tabel 17.

Tabel 18. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2022

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Badan PPSDMP/Kantor Pusat (KP)	58.893.120.000	58.695.642.081	99,66
2	Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	15.012.890.000	14.983.155.080	99,80
3	UPT Pelatihan/ Kantor Daerah (KD)	99.239.320.000	98.875.451.224	99,63
4	UPT Pendidikan/ Kantor Daerah (KD)	110.283.053.000	109.601.296.254	99,38
	Total	283.428.383.000	282.155.544.639	99,55

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022



Persentase realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP tahun 2022 yang tertinggi adalah UPT Pendidikan/Kantor Pusat (KP) yaitu 99,80%, sedangkan yang terendah adalah UPT Pendidikan/Kantor Pusat (KD) yaitu 99,38%.